

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial

Pemateri :

1. Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif, The Indonesian Institute
2. Nur Dwiwati, Kabag Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3. Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Eka Prasetiawaty, Ketua Kelompok Tani Hutan Kamojang Hejo

Moderator : Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII

- Pada awal diskusi, Adinda memaparkan terkait penelitian TII yang berjudul Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini bekerja sama dengan Yayasan Almisbat dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Skema Hibah Alumni (Alumni Grant Scheme), yang diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia.
- Adinda menyampaikan hasil penelitian TII memperlihatkan bahwa implementasi program perhutanan sosial di Kabupaten Garut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah tantangan dalam proses pengimplementasian kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, hingga disposisi atau sikap.
- Pada aspek komunikasi, temuan penelitian ini menemukan bahwa perlu adanya koordinasi dan komunikasi antar para pemangku kebijakan untuk dapat melaksanakan program ini. Pada aspek sumberdaya muncul tantangan berupa masih minimnya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan akses pada modal, teknologi, serta sarana dan prasarana
- Pada aspek disposisi/ sikap tantangan yang muncul adanya perbedaan pandangan antar Kementerian/ Lembaga atau dinas di tingkat daerah terkait program ini. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi ditemukan bahwa panjangnya prosedur pengajuan SK menjadi tantangan bagi KTH.

- Adinda mengatakan pada dasarnya program perhutanan sosial ini sangat baik dan manfaatnya terasa oleh masyarakat, khususnya para petani hutan. Sebab, dengan adanya program perhutanan sosial, maka ada kepastian hukum terkait lahan garapan dan hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, program ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan yang kami lihat adalah belum setaranya perempuan dan laki-laki ketika menerima manfaat dari program perhutanan sosial.
- Adinda menjelaskan bahwa akar permasalahannya terletak pada masih minimnya partisipasi perempuan dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Lebih lanjut, minimnya keterlibatan perempuan dalam KTH dikarenakan minimnya peran perempuan dalam proses pengelolaan hutan. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam program perhutanan sosial dikarenakan minimnya partisipasi perempuan dalam KTH. Selanjutnya, minimnya perempuan di KTH dikarenakan masih adanya konteks di mana perempuan memiliki peran minimal dalam proses pengelolaan hutan.
- Adinda mengatakan bahwa penelitian TII ini memberikan beberapa rekomendasi baik terkait konten dan konteks kebijakan, khususnya terkait dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya organisasi KTH. Misalnya, dengan mendorong agar dibentuk KTH khusus perempuan; memberikan ruang partisipasi dan peran yang bermakna bagi perempuan dengan dukungan peningkatan kapasitas di KTH, hingga mendorong pendamping program perhutanan sosial yang berperspektif gender.

Eka Prasetyawati, KTH Kamojang Hejo

- KTH Kamojang Hejo lebih banyak anggota perempuan karena banyak ibu-ibu yang menggarap lahan sedangkan suaminya bekerja di luar Garut.
- Permasalahan pertama, selama ini penggarapan masih sharing dengan perhutani. Dan hasil sharing itu belum bisa menutup perekonomian mereka. Kedua, pupuk juga belum memadai karena pemerintah belum ada kontribusinya. Sedangkan lahan garapan berada di kawasan hutan dan bukit.
- Saat ini, yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kami sharing dengan Ibu Nissa Wargadipura yang mendampingi kami.
- KTH Kamojang Hejo menerima kelompok lain untuk memberikan tambahan modal dalam meningkatkan produktivitas bisa dalam bentuk peralatan dan lain-lain.
- Pada aktivitasnya, kami banyak menanam kopi, tapi kami juga ingin menanam tanaman-tanaman endemi.

Eko Novi Ariyanti, Kemen PPPA

- Pengarusutamaan gender merupakan salah satu aspek dalam pembangunan termasuk dalam program perhutanan sosial.
- Berbicara mengenai peran perempuan dalam perhutanan sosial, tentunya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan. Telah banyak regulasi mengenai pentingnya arus utama gender dalam pembangunan, dan sejauh mana pelibatan perempuan di dalamnya. Pelibatan perempuan merupakan layanan dasar
- Partisipasi yang setara merupakan bentuk keadilan gender termasuk dalam program perhutanan sosial. Namun, permasalahannya keterlibatan perempuan masih kurang (Cifor, 2013). Kondisinya, 35

persen masyarakat hidup dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan sebagian besar masih dalam kemiskinan.

- Dalam integrasi gender di perhutanan sosial, pelibatan perempuan tidak selalu soal jumlah perempuan yg ikut serta tp sudah sepatutnya menciptakan lingkungan atau sistem yang turut mendukung untuk pemenuhan kebutuhan.
- Secara normatif, sudah ada pelibatan perempuan dalam peraturan Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan. Namun, masih sangat kurang. Sejauh mana pelibatan juga sulit diperoleh sumbernya.
- Apabila dilihat dari keterlibatan perempuan dalam kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), 94 anggota dan pengurus didominasi oleh laki-laki. Ini merupakan tantangan dan menjadi isu. Selama ini partisipasi perempuan masih kurang dan masih menguntungkan laki-laki. Pihak perempuan juga masih diidentikkan dengan tugas-tugas domestik. Ketimpangan partisipasi mengakibatkan distribusi manfaat tidak merata. Pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan belum seluruhnya sensitif gender. Contohnya pengajuan izin perhutanan sosial hanya bisa diajukan oleh kepala keluarga.
- Perlu ada upaya upaya untuk mengintegrasikan PUG. Perlu ada strategi nasional, responsif gender, dan komitmen pemerintah. Rekomendasi dari Kemen PPA terkait Perhutanan Sosial adalah perlunya data pilah calon petani hutan perempuan yang potensial untuk ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian juga ada advokasi untuk mengintegrasikan keterwakilan perempuan agar menjadi penting.

Nur Dwiwati, Kemen LHK

- Saat ini, capaian perhutanan sosial yang sudah mengelola 5.318.627,20 Ha, kurang lebih sebanyak 1.188.498 KK dan 8.041 Unit SK kelompok Perhutanan sosial seluruh Indonesia. Namun memang representasi perempuan hanya 5 persen. Mengapa dalam SK hanya tercantum kepala keluarga? Karena pengelolaannya adalah anggota keluarganya.
- Ada 3 fokus percepatan yaitu percepatan distribusi akses legal, peningkatan kualitas, dan percepatan dan optimalisasi pendampingan. Perlu ada sinergi dan kolaborasi antar program seperti akademisi, K/L, pemda, Bumh, media massa, dan lain-lain.
- Perempuan perlu diberikan peran dalam perhutanan sosial baik dalam mengelola pengurus, pendamping, maupun anggota. Sehingga, perempuan memperoleh pendapatan dan ekonomi keluarga meningkat, ketahanan pangan keluarga, dan kelestarian lingkungan.
- Tantangan yang ada adalah masih ada kesenjangan di informasi, pemahaman, sumber daya, kelembagaan, dan kapasitas. Padahal, perhutanan sosial mendukung dalam pencapaian SDGs. Untuk membangun dan menciptakan kemandirian kelompok, perlu keterlibatan perempuan dan peran perempuan di pasca panen. Perlu ada peningkatan sosialisasi, komunikasi, pemahaman, pemberoan peran, dan kapasitas. Kolaborasi integrasi dari semua pihak juga tak kalah penting.

FORUM DISKUSI

Tanggapan Ibu Nissa Wargadipura

1. Bahwa kondisi kelompok tani perempuan masih menemukan banyak kendala baik permodalan maupun administrasi. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan SK Perhutanan sosial bagi perempuan. Padahal, perempuanlah yang mengelola dan sepenuhnya dari mulai menanam hingga memanen.

Jawaban Eko Novi

1. Peraturan keterlibatan dan indikatornya sudah di buat dan berharap Kemen KLHK dapat melakukan ajakan kolaborasi dengan Kemen PPPA untuk masuk dalam pokja keterlibatan perempuan..

Jawaban Nur Dwiwati

1. Lama tidaknya SK berdasarkan prosedur. Kondisinya saat ini di Pulau Jawa pada khususnya untuk dikeluarkannya SK masih stagnasi karena ada regulasi-regulasi yang menghambat. Kami saat ini masih inventarisasi usulan-usulan dalam mengeluarkannya SK. Prosedurnya, jika dokumen lengkap seharusnya dapat diproses. Untuk komunikasi sebenarnya di direktorat kami dapat dilihat berdasarkan system tapi jika tidak ada akan dapat kami bantu.

Closing Statement

1. Nur Dwiwati

Program Perhutanan Sosial sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan perempuan. Kami sangat senang sekali jika perempuan mendapatkan manfaat dari Program Perhutanan Sosial

2. Eko Novi

Perlu adanya kerjasam untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam Program Perhutanan Sosial.

3. Adinda

Kami sebagai lembaga peneliti kebijakan publik seringkali menemukan persoalan klasik dari birokrasi misalnya persoalan koordinasi dan lain-lain, maka pada kesempatan ini kami senang bahwa dapat mempertemukan sejumlah pihak untuk dapat berkomunikasi. Kami pada kesempatan ini juga berterima kasih kepada para pihak yang membantu kami. Kedepan diharapkan KTH-KTH dapat saling berjejaring terutama KTH perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi secara optimal. Besar harapan kami penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pihak.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~